

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI  
PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH (DOKA)  
DI KABUPATEN ACEH BARAT**

Ar Rizha Islami  
32.0007

*Asdaf Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh  
Program Studi Kebijakan Publik  
Email: [rzhaislami@gmail.com](mailto:rzhaislami@gmail.com)*

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Murtir Jedawi, SH, S.sos, M.Si.

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** *overty remains a persistent structural issue in West Aceh Regency, despite the region receiving Special Autonomy Funds for Aceh (DOKA), which are intended to accelerate development and improve community welfare. Although various programs have been implemented, poverty alleviation efforts have not yet reached optimal outcomes, indicating a gap between budget allocation and effective implementation on the ground. Purpose:* This study aims to analyze the implementation of poverty alleviation policies through the utilization of DOKA in West Aceh Regency. **Method:** *Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with key stakeholders, including local government officials, beneficiaries, and non-governmental organizations. Results/Findings:* The findings show that DOKA has made a significant contribution to reducing poverty, particularly by improving access to education, healthcare, and economic empowerment programs. Data from the Central Bureau of Statistics (BPS) of West Aceh recorded a decrease in the poverty rate from 17.25% in 2020 to 15.68% in 2023, indicating a positive impact of the policy interventions. However, several challenges persist, including low levels of transparency and accountability in fund management, overlapping programs among agencies, and limited community involvement in the planning stages. **Conclusion:** The implementation of poverty alleviation policies through the use of the Aceh Special Autonomy Fund (DOKA) in West Aceh Regency has not yet fully gone well.

**Keywords:** *Policy implementation, Poverty alleviation, Special autonomy funds*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan struktural yang kompleks di Kabupaten Aceh Barat, meskipun daerah ini memperoleh Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program telah dijalankan, namun capaian pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara alokasi anggaran dengan efektivitas implementasi di lapangan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan DOKA di Kabupaten Aceh. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah

daerah, masyarakat penerima manfaat, serta organisasi non-pemerintah **Hasil/Temuan:** sil penelitian menunjukkan bahwa DOKA memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, khususnya melalui peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi. Data dari BPS Kabupaten Aceh Barat mencatat penurunan angka kemiskinan dari 17,25% pada tahun 2020 menjadi 15,68% pada tahun 2023, mencerminkan adanya dampak positif dari intervensi kebijakan. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, antara lain rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, tumpang tindih program antarinstansi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) di Kabupaten Aceh Barat belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

**Kata kunci:** Implementasi kebijakan, dana otonomi khusus pengentasan kemiskinan.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan struktural yang terus menjadi tantangan utama dalam pembangunan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Meskipun pemerintah daerah telah mendapatkan kewenangan dalam pengelolaan rumah tangga sendiri melalui kebijakan otonomi daerah, angka kemiskinan di Aceh Barat masih tinggi dan kerap kali melampaui rata-rata provinsi maupun nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat berada pada angka 17,86%, lebih tinggi dibandingkan dengan angka provinsi Aceh sebesar 14,45% dan angka nasional sebesar 9,03%. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Dana Otonomi Khusus, memberikan alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebagai bentuk afirmasi fiskal untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan menurunkan angka kemiskinan di wilayah Aceh.

Namun, implementasi penggunaan DOKA di Kabupaten Aceh Barat dinilai belum berjalan maksimal. Pemerintah setempat belum sepenuhnya mengalokasikan dana tersebut secara proporsional untuk program pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data P3KE oleh Kemenko PMK, tercatat bahwa sebanyak 4.784 kepala keluarga atau sekitar 22.186 jiwa di Aceh Barat tergolong dalam desil 1, yakni kelompok dengan 10% kesejahteraan terendah. Ketidakefektifan ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya perencanaan berbasis data, lemahnya koordinasi antar instansi pelaksana, serta alokasi anggaran yang lebih banyak terserap pada pembangunan infrastruktur monumental daripada program berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Selain itu, tantangan dalam bentuk birokrasi yang berbelit, minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, serta lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi turut memperburuk efektivitas implementasi kebijakan.

Otonomi khusus semestinya memberikan peluang besar bagi Aceh Barat untuk mengejar ketertinggalan pembangunan pascakonflik dan bencana, namun kenyataannya hanya sebagian kecil dari dana tersebut yang benar-benar menyentuh langsung kebutuhan kelompok miskin (Ramazan & Safrida, 2022). Pemerintah daerah sejauh ini juga belum menunjukkan konsistensi dalam mengintegrasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara menyeluruh dalam pengelolaan dana DOKA. Di sisi lain, jika DOKA dapat dikelola secara tepat sasaran dan berkelanjutan, Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi besar

untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, menekan angka pengangguran, menurunkan kriminalitas, dan menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik.

Melihat permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui DOKA di Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan, apa saja faktor penghambatnya, dan upaya-upaya apa yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan kebijakan tersebut. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan praktis dalam memperkuat efektivitas kebijakan afirmatif di daerah khusus, khususnya dalam konteks pengentasan kemiskinan di Aceh Barat.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kesenjangan atau gap dalam penelitian terkait pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Pertama, meskipun berbagai program dan kebijakan telah diluncurkan oleh pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan, belum terdapat gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut secara nyata di lapangan. Kedua, meskipun ada indikasi adanya kendala dalam proses implementasi kebijakan, belum jelas faktor-faktor penghambat apa saja yang secara spesifik mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini membuka ruang untuk mengidentifikasi berbagai tantangan administratif, kelembagaan, sosial, maupun sumber daya yang belum diungkap secara mendalam. Ketiga, upaya-upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut juga masih minim dieksplorasi, sehingga belum diketahui strategi atau langkah yang efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih mendalam tentang pelaksanaan kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta solusi yang telah atau dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam rangka meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai implementasi dana otonomi khusus sebagai instrumen kebijakan untuk pengentasan kemiskinan, khususnya di Provinsi Aceh. Penelitian Ramazan dan Safrida (2022) menemukan bahwa pengelolaan dana otonomi khusus di Aceh Barat belum menunjukkan hasil yang optimal karena lemahnya kerangka strategis dan minimnya integrasi antarinstansi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Ikhsan et al. (2023) yang menyoroti tingginya tingkat kemiskinan di Aceh meskipun provinsi ini mendapat alokasi dana otonomi khusus yang besar; mereka menyebut kondisi ini sebagai ironi kebijakan afirmatif yang tidak berjalan sesuai harapan karena lemahnya fungsi pengawasan dan akuntabilitas program publik. Sebaliknya, studi oleh Haikal (2023) dari IPDN menunjukkan bahwa ketika dana publik dikelola secara transparan dan berbasis partisipasi, seperti dalam praktik Baitul Mal, kebijakan dapat memberikan dampak langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan, khususnya pada kelompok rentan.

Selanjutnya penelitian tentang implementasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada Anak Jalanan di Kota Tanjungpinang penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terstruktur dalam program penanganan masalah kesejahteraan sosial, khususnya bagi anak jalanan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada

koordinasi antarinstansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program (Rovi *et al.* 2019). Penelitian lainnya yang berjudul Implementasi Pandu Gempita dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat Studi ini mengungkapkan bahwa meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah diluncurkan, efektivitasnya masih terbatas karena kurangnya integrasi antarprogram dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Hal ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih holistik dan sinergis dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan (Saputra, 2019). Kemudian Penelitian yang berjudul sejauh Mana Tingkat Pengurangan Kemiskinan Dengan Mewajibkan Zakat Profesi: Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Barat penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan mewajibkan zakat profesi dapat berkontribusi signifikan dalam pengurangan kemiskinan jika didukung oleh regulasi yang kuat dan sistem distribusi yang transparan. Hal ini menekankan pentingnya kerangka hukum dan mekanisme pengawasan yang efektif dalam implementasi kebijakan sosial (Nurrahman, 2019).

Dalam konteks yang lebih luas, Pribadi, Lan, dan Agussabti (2023) menyatakan bahwa strategi pengeluaran publik untuk pengentasan kemiskinan di Aceh belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, serta lemahnya integrasi data dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, studi internasional oleh Khairuzzaman *et al.* (2022) di Bangladesh menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dan penguatan kapasitas lokal dalam pelaksanaan program berbasis otonomi fiskal; mereka menemukan bahwa desentralisasi keuangan mampu menurunkan tingkat kemiskinan jika didukung dengan tata kelola yang baik dan transparan. Penelitian lain oleh Sultanova *et al.* (2023) juga menegaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada pembangunan kapasitas masyarakat, pendidikan, dan partisipasi sosial memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan perubahan sosial berkelanjutan. Di sisi lain, penelitian oleh Ahmed dan Chowdhury (2021) menunjukkan bahwa penggunaan dana publik tanpa pengawasan yang kuat dan akuntabilitas kelembagaan justru berisiko memperkuat ketimpangan sosial dan gagal dalam pengurangan kemiskinan struktural

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan fokus khusus pada peran kebijakan pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat, yang masih jarang dibahas secara mendalam dalam literatur sebelumnya. Kebaruan tersebut terletak pada pendekatan analisis yang tidak hanya meninjau pelaksanaan kebijakan secara umum, tetapi juga mengidentifikasi faktor penghambat serta merumuskan upaya strategis untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan tersebut secara kontekstual di daerah dengan status otonomi khusus. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak bersifat teoritis atau berskala nasional, penelitian ini memberikan kontribusi praktis yang aplikatif bagi pemerintah daerah dan masyarakat Aceh Barat, sehingga hasilnya dapat dijadikan rujukan konkret dalam pengambilan kebijakan dan pengembangan program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan sesuai kondisi lokal.

#### **1.5. Tujuan**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat, khususnya melalui pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang

muncul dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Selanjutnya, penelitian ini berupaya merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat, sehingga program yang dijalankan dapat memberikan hasil yang lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh di Kabupaten Aceh Barat. Metode ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk menggambarkan realitas sosial dan kebijakan publik secara kontekstual, sekaligus menangkap dinamika interaksi antaraktor dalam proses pelaksanaan kebijakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dipilih sebagai teknik utama karena mampu menggali informasi langsung dari para pelaku dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan, tokoh masyarakat, serta penerima manfaat program pengentasan kemiskinan. Informan tersebut dipilih secara purposive karena memiliki pengetahuan, kewenangan, dan pengalaman langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang dibiayai oleh Dana Otonomi Khusus. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat pada bulan Februari hingga April 2024, dengan lokasi penelitian yang mencakup kantor instansi pemerintah terkait serta beberapa gampong (desa) yang menjadi sasaran program. Pemilihan lokasi tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dari tingkat perumus kebijakan hingga masyarakat penerima manfaat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pelaksanaan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat melalui Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh

Pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat melalui pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (DOK) Aceh menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. DOK dialokasikan untuk berbagai program yang bertujuan mengurangi kemiskinan, termasuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan, dan akses layanan kesehatan. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur dasar menjadi prioritas, di mana proyek-proyek seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung kegiatan ekonomi lokal. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan pelatihan keterampilan dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) berfungsi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan juga menjadi fokus, dengan inisiatif seperti program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu dan peningkatan fasilitas kesehatan. Masalah kemiskinan di wilayah perkotaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelayanan dasar. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan harus mempertimbangkan konteks sosial yang kompleks dan beragam antar daerah (Kurnaesih *et al.*, 2025). Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting, di mana mereka dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi program, sehingga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Kerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk LSM dan pemerintah

pusat, juga diperkuat untuk mendukung keberhasilan program. Akhirnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DOK diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif, sehingga dapat memberikan dampak signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat.

### **3.1. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Di Aceh Baray Dalam Menjalankan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Otonomi Khusus Aceh**

Kendala adalah hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam suatu proses atau kegiatan yang dapat menghambat kemajuan atau pencapaian. Pada bagian ini, peneliti membahas beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Khususnya Badan Perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten Aceh barat dalam melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan Melalui Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Di Aceh Barat. Kendala tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut.

#### **1. Kurangnya Riset Dan Data Warga Miskin Di Kabupaten Aceh Barat**

Pengelolaan dana otonomi khusus (OTSUS) di Aceh Barat dalam pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan menghadapi kendala utama berupa kurangnya data yang akurat dan valid mengenai kondisi masyarakat miskin. Data yang tidak terkini dan kurang tepat menyebabkan perencanaan program menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya, sehingga dampak dana OTSUS terhadap pengentasan kemiskinan menjadi kurang optimal. Selain itu, minimnya riset lapangan dan kurangnya pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat turut memperburuk relevansi dan efektivitas kebijakan yang diambil. Kepala BAPPEDA Aceh Barat, Bapak Wistha Nowar, mengungkapkan bahwa tanpa data yang valid dan riset yang memadai, pemerintah sulit merancang intervensi yang tepat sasaran, dan hal ini dapat menyebabkan sebagian masyarakat miskin tidak tercover oleh program bantuan. Keterbatasan partisipasi masyarakat dan minimnya evaluasi program juga menjadi faktor yang menghambat perbaikan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam kualitas data, metodologi pengumpulan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan analisis data dan evaluasi program, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.

#### **2. Birokrasi Yang Rumit Dalam Menjalankan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh**

Pengentasan kemiskinan di Aceh Barat masih jauh dari keberhasilan yang optimal karena pengelolaan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) menghadapi kendala birokrasi yang kompleks dan rumit. Salah satu masalah utama adalah tingginya frekuensi pergantian pejabat di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Barat, yang menyebabkan hilangnya pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan program. Selain itu, Bappeda juga kekurangan staf terlatih yang memahami prosedur pengelolaan dana OTSUS secara memadai, sehingga berdampak negatif pada implementasi kebijakan. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bapak Wahyu Rovaldy, menyampaikan bahwa proses administrasi yang panjang dan birokrasi berlapis menjadi hambatan utama, di mana prosedur pengajuan proposal hingga pencairan dana dapat memakan waktu berbulan-bulan. Kompleksitas prosedur dan regulasi yang saling bertentangan memperlambat pelaksanaan program dan menimbulkan frustrasi di kalangan pegawai maupun masyarakat penerima manfaat. Namun, terdapat harapan untuk perbaikan melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan pelatihan sumber daya manusia, dan

penguatan koordinasi antar instansi, sehingga pengelolaan dana dapat menjadi lebih efisien dan berdampak nyata dalam mengentaskan kemiskinan.

### **3. Masih Kurangnya Mekanisme Pengawasan Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Untuk Pengentasan Kemiskinan di Aceh Barat**

Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) di Aceh Barat dalam upaya pengentasan kemiskinan menghadapi kendala serius terkait kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat belum memiliki struktur pengawasan yang jelas dan terintegrasi untuk memantau penyaluran dan pemanfaatan dana tersebut secara menyeluruh. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan juga sangat minim, sehingga akuntabilitas penggunaan dana menjadi rendah. Contohnya, masyarakat jarang dilibatkan dalam penentuan penerima manfaat program bantuan sosial, yang berpotensi menimbulkan ketidaktransparanan. Selain itu, informasi mengenai penggunaan dana, termasuk laporan keuangan dan capaian program, tidak dipublikasikan secara terbuka sehingga masyarakat tidak mendapatkan akses informasi yang memadai. Dalam wawancara dengan Bapak Idris Husein, Tuha Peut Gampong Drien Rampak, beliau menyampaikan kekhawatiran mengenai kurangnya pengawasan dan transparansi dalam penggunaan dana OTSUS, yang dapat membuka peluang penyalahgunaan dana. Beliau menegaskan pentingnya adanya mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat agar proses penggunaan dana dapat lebih transparan dan akuntabel.

### **3.2 Standar Dan Sasaran Dari Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh**

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menetapkan standar dan sasaran kebijakan yang jelas sebagai sarana untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program pengentasan kemiskinan sekaligus meminimalisir konflik antar agen pelaksana. Kepala Bappeda Aceh Barat, Bapak Wistha Nowar, menyampaikan bahwa sasaran utama mencakup pengurangan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Setiap program dilengkapi dengan indikator kinerja yang spesifik dan terukur, seperti data statistik pendapatan masyarakat, tingkat kemiskinan, partisipasi sekolah, dan tingkat kelulusan. Proses evaluasi dilakukan secara berkala melalui survei lapangan dan analisis data untuk menilai keberhasilan program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dianggap penting untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi serta mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan dampak positif penggunaan dana, tetapi juga mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul antar agen pelaksana selama implementasi kebijakan.

#### **1. Sumber Daya**

Menurut teori Van Meter dan Van Horn (1975), sumber daya merupakan elemen penting yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks pengentasan kemiskinan di Aceh Barat melalui pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (DOKA), ketersediaan anggaran masih menjadi kendala utama. Kepala Bappeda Aceh Barat, Bapak Wistha Nowar, menyatakan bahwa anggaran yang tersedia belum mencukupi, sementara tantangan yang dihadapi semakin kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih holistik. Selain itu, program-program pengentasan kemiskinan sering kali tidak terintegrasi dengan baik dan infrastruktur yang kurang memadai menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar. Kepala Bidang Perencanaan, Bapak Kemal Pasha Rostina, menambahkan bahwa alokasi dana DOKA melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten, serta partisipasi masyarakat sipil yang

berperan sebagai pengawas dan pemberi masukan agar penggunaan dana tepat sasaran. Namun, mekanisme pengawasan yang masih lemah perlu ditingkatkan untuk memastikan penggunaan dana lebih efisien dan efektif. Kolaborasi antar berbagai pihak menjadi faktor krusial dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada demi keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan.

## **2. Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Pelaksanaan pengelolaan dana otonomi khusus (OTSUS) untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat dilakukan dengan mengikuti standar operasional prosedur yang jelas dan terstruktur. Menurut Bapak Wahyu Rovaldy, proses dimulai dengan analisis kebutuhan masyarakat melalui survei dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan lokal agar program yang dirancang benar-benar relevan dengan kondisi dan kebutuhan setempat. Selanjutnya, instansi terkait diminta menyusun proposal program yang harus memuat tujuan, sasaran, dan rencana pelaksanaan secara rinci sesuai format yang ditetapkan. Proposal tersebut kemudian dievaluasi oleh tim teknis untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan dan prioritas daerah sebelum dana dicairkan secara bertahap. Selama pelaksanaan, monitoring berkala dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan target tercapai. Pada tahap akhir, evaluasi dampak program dilakukan untuk menilai keberhasilan program serta menyusun laporan pertanggungjawaban yang transparan. Proses ini mencerminkan karakteristik organisasi pelaksana yang sistematis, terorganisir, dan bertanggung jawab, dengan mekanisme kontrol internal yang kuat untuk memastikan optimalisasi penggunaan dana dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **3. Sikap Pelaksana**

Dimensi sikap pelaksana memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kemal Pasya, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah Bappeda Aceh Barat, pelaksana di Bappeda menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan kebijakan tersebut. Mereka menekankan pentingnya perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta melibatkan seluruh anggota tim secara aktif dalam proses pelaksanaan. Komunikasi yang intensif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan juga menjadi strategi penting untuk memperoleh masukan yang konstruktif. Monitoring dan evaluasi yang rutin dijalankan menjadi bukti nyata upaya memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan memberikan dampak positif nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi yang modern juga berperan signifikan dalam mendukung pelaksanaan program. Sistem informasi manajemen yang telah diterapkan memungkinkan pengelolaan data penerima dana secara efisien dan akurat. Aplikasi mobile memudahkan masyarakat mengakses informasi program secara transparan, sedangkan teknologi pemantauan berbasis geospasial membantu evaluasi lokasi dan dampak program di lapangan secara real-time. Integrasi teknologi tersebut tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana otonomi khusus, tetapi juga memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di Aceh Barat. Dengan demikian, sikap pelaksana yang berkomitmen dan dukungan teknologi yang memadai menjadi dua faktor kunci yang saling melengkapi dalam mengoptimalkan keberhasilan program.

## **4. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana**

Dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui dana OTSUS di Aceh Barat, frekuensi dan kualitas komunikasi antar pelaksana kebijakan dan pemangku kepentingan menjadi faktor krusial untuk keberhasilan program. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bappeda Aceh Barat, pengelolaan dana OTSUS melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Pendidikan, hingga organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat. Komunikasi dan koordinasi dijalin secara intensif melalui rapat rutin, forum diskusi, dan pemanfaatan platform digital yang memungkinkan komunikasi cepat dan efektif. Intensitas interaksi antara Bappeda dan pihak terkait lainnya dilakukan secara teratur, minimal sebulan sekali, melalui pertemuan resmi untuk memberikan informasi, mendengarkan masukan, serta melakukan sosialisasi program kepada masyarakat. Forum diskusi yang digelar secara berkala juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik. Pendekatan komunikasi yang rutin dan kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana OTSUS, tetapi juga memperkuat kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, sinergi yang terbangun diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana OTSUS untuk pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh Barat secara berkelanjutan.

## **5. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Dalam pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui dana Otonomi Khusus di Kabupaten Aceh Barat, pendekatan ekonomi, sosial, dan politik sangat penting untuk memastikan keberhasilan program. Dukungan kuat dari pemangku kepentingan politik, seperti anggota legislatif dan pemerintah daerah, terlihat dari alokasi anggaran yang memadai serta keterlibatan aktif mereka dalam perencanaan dan evaluasi, sehingga memperkuat efektivitas implementasi kebijakan. Secara sosial, masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dan partisipasi aktif dalam program seperti pembangunan rumah layak huni dan perbaikan infrastruktur, meskipun masih ada tantangan keterbatasan akses informasi di beberapa wilayah yang menjadi fokus peningkatan komunikasi dan sosialisasi. Keberhasilan program penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh sinergi antar lembaga pelaksana serta efektivitas koordinasi lintas sektor. Kelemahan dalam implementasi sering kali terletak pada ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan (Irawan & Averus, 2024). Secara ekonomi, program diarahkan untuk memberikan manfaat langsung melalui peningkatan fasilitas dasar dan akses pekerjaan, dengan harapan mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Pendekatan terpadu ini menunjukkan bahwa sinergi politik, partisipasi sosial, dan dukungan ekonomi yang tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan di Aceh Barat.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) di Kabupaten Aceh Barat telah memberikan kontribusi positif dalam menurunkan angka kemiskinan, khususnya melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pendidikan, dan perluasan layanan kesehatan dasar. Penurunan angka kemiskinan dari 18,81% pada tahun 2021 menjadi 17,86% pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki dampak yang nyata. Namun demikian, efektivitas program belum maksimal karena masih terdapat sejumlah kendala, seperti lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, kurangnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program. Temuan ini sejalan dengan

hasil penelitian Hariadi (2024) yang juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang. Ia menemukan bahwa ketidakterpaduan program antarinstansi menghambat pencapaian sasaran pengentasan kemiskinan secara efektif. Sama halnya dengan temuan penelitian ini, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga teknis, dan masyarakat. Temuan ini juga memperkuat penelitian Rumbekwan (2023), yang menunjukkan bahwa dana otonomi khusus di Papua belum optimal karena minimnya pelibatan masyarakat dan lemahnya mekanisme evaluasi kinerja program. Di Kabupaten Aceh Barat, partisipasi masyarakat dalam perencanaan program masih bersifat simbolik dan belum substansial, sehingga kebutuhan riil warga miskin tidak sepenuhnya tercermin dalam desain kebijakan.

Selain itu, penelitian Haikal (2023) tentang peran Baitul Mal dalam pengurangan kemiskinan di kota juga menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan program sangat ditentukan oleh transparansi pengelolaan dan pengawasan yang kuat. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini, di mana lemahnya kontrol publik dan belum optimalnya audit eksternal menyebabkan potensi penyalahgunaan dana DOKA masih menjadi kekhawatiran. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, program cenderung tidak tepat sasaran dan kehilangan legitimasi publik. Berbeda dengan penelitian Jalil et al. (2020), yang menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal cenderung menurunkan inflasi namun tidak secara signifikan berdampak pada kinerja sosial seperti pengurangan kemiskinan, temuan ini menunjukkan bahwa jika dikelola secara efektif, desentralisasi melalui DOKA justru dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh konteks lokal yang berbeda serta adanya kebijakan afirmatif seperti dana otonomi khusus yang memiliki fokus sektoral. Temuan ini juga memperkuat studi oleh Che Mata et al. (2020) yang menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan dari sektor nonpertanian dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan di daerah pedesaan. Hal ini relevan dengan program pemberdayaan ekonomi di Aceh Barat yang mengembangkan usaha mikro dan keterampilan kerja, meskipun skalanya masih terbatas. Sementara itu, temuan ini menolak simpulan Chattopadhyay dan Mallick (2005), yang menyatakan bahwa peningkatan variasi pendapatan dalam jangka pendek justru memperburuk tingkat kemiskinan. Dalam konteks Aceh Barat, diversifikasi sumber pendapatan melalui pelatihan kewirausahaan justru berdampak positif terhadap penghidupan masyarakat miskin. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh karakteristik sosial ekonomi masyarakat Aceh Barat yang relatif homogen, serta adanya intervensi pemerintah yang menstabilkan dampak awal dari fluktuasi pendapatan tersebut.

Dengan demikian, diskusi ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan melalui DOKA sangat bergantung pada tata kelola yang baik, keterlibatan masyarakat secara aktif, serta pengawasan berkelanjutan. Ke depan, diperlukan penguatan mekanisme evaluasi program, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat agar kebijakan dapat berjalan lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) di Kabupaten Aceh Barat belum optimal. Beberapa kendala ditemukan pada dimensi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya yang belum merata, serta pengawasan dalam organisasi pelaksana. Meski komunikasi antar pelaksana dan komitmen pelaksana cukup baik, sosialisasi kepada masyarakat masih kurang. Faktor penghambat utama meliputi lemahnya pengawasan, kurangnya data yang akurat, dan birokrasi yang kompleks. Upaya optimalisasi dapat dilakukan melalui

penguatan data, peningkatan akses layanan dasar, serta monitoring dan evaluasi berkala. **Keterbatasan penelitian**, Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan studi di masa mendatang. Pertama, cakupan data yang digunakan masih terbatas pada informasi dari narasumber instansi pemerintah dan dokumen kebijakan, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil dan dinamika sosial ekonomi masyarakat miskin di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Kedua, keterbatasan dalam akses terhadap data pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) secara terperinci menghambat analisis yang lebih mendalam terhadap efektivitas alokasi dana tersebut. Ketiga, penelitian ini belum sepenuhnya mengeksplorasi peran aktor non-pemerintah seperti masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses implementasi kebijakan. Terakhir, kendala waktu dan sumber daya menyebabkan proses observasi lapangan dan triangulasi data tidak dilakukan secara menyeluruh di seluruh kecamatan. Keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan data, melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, serta menggali pendekatan kolaboratif yang lebih komprehensif dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan. **Arah masa depan penelitian**, arah masa depan penelitian dapat difokuskan pada beberapa aspek strategis untuk mendukung efektivitas implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) di Kabupaten Aceh Barat. Pertama, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada pembaruan basis data masyarakat miskin yang lebih akurat dan terintegrasi, sebagai dasar perencanaan program yang tepat sasaran. Kedua, penting untuk mengkaji secara mendalam efektivitas sistem monitoring dan evaluasi pemanfaatan DOKA serta mekanisme birokrasi yang mendukung pelaksanaannya. Ketiga, studi ke depan juga dapat menelusuri model kolaborasi lintas sektor dan potensi pembentukan tim khusus lintas kelembagaan dalam menangani kemiskinan, guna memastikan sinergi yang lebih kuat. Terakhir, penelitian selanjutnya perlu mengevaluasi strategi optimalisasi pemanfaatan DOKA di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Badan Pembangunan Dan Perencanaan Daerah Kabupaten Aceh Barat, Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Alam, Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat dan pihak yang membantu dalam pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, A., & Chowdhury, S. (2021). Accountability and the Paradox of Public Spending in South Asia. *World Development*, 145, 105661. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105661>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Aceh Barat dalam Angka 2024*. Meulaboh: BPS Kabupaten Aceh Barat.
- Chattopadhyay, A. K., & Mallick, S. K. (2005). Income Distribution Dependence of Poverty Measure: A Theoretical Analysis. *arXiv preprint arXiv:physics/0507035*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.physics/0507035>
- Che Mata, S. H., Abdul Jalil, A. Z., & Harun, M. (2020). Does Non-Farm Income Improve the Poverty and Income Inequality Among Agricultural Household in Rural Kedah?

- arXiv preprint* arXiv:2001.03487. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2001.03487>
- Haikal, M. H. (2023). *Peran Baitul Mal dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kota*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <https://eprints.ipdn.ac.id/19885/>
- Hariadi, M. (2024). *Kolaborasi Pemerintahan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <https://eprints.ipdn.ac.id/19418/>
- Ikhsan, Latif I, Hajad V, Hasan E, Mardhatillah M, Herizal. (2023). The Abundance of Special Autonomy Funds: An Ironic Portrait of Aceh's Poverty Alleviation. *Journal of Government and Civil Society*, 7(96). <https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i1.6441>
- Irawan, Z. A. H., & Averus, S. (2024). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Brebes*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Pribadi, J., Lan, J. Y., & Agussabti. (2023). Poverty alleviation strategy and public expenditure in Aceh, Indonesia. *Bandung: Journal of the Global South*, 10(2), 206–222. <https://doi.org/10.1163/21983534-10020004>
- Jalil, A. Z. A., Harun, M., & Che Mat, S. H. (2020). Macroeconomic Instability and Fiscal Decentralization: An Empirical Analysis. *arXiv preprint* arXiv:2001.03486. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2001.03486>
- Khairuzzaman, M., Islam, R., & Hossain, M. A. (2022). Fiscal Decentralization and Poverty Reduction: Evidence from Bangladesh. *Cogent Economics & Finance*, 10(1), 2051260. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2051260>
- Kurnaesih, U., Arum, R. A., Mahmuddin, Faisal, M. (2025). Pengaruh Modal Sosial, Pendidikan, Dan Kewirausahaan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Pedesaan. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5(1), 4174–4185. <https://doi.org/10.54373/ifiieb.v5i1.2670>
- Nurrahman, A. (2019). Sejauh Mana Tingkat Pengurangan Kemiskinan Dengan Mewajibkan Zakat Profesi: Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *JE & KP*, 6(2), 123-138. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/6248>
- Pemerintah Aceh. (2018). *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Dana Otonomi Khusus Aceh*. Banda Aceh: Sekretariat Daerah Aceh.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62*.
- Ramazan S & Safrida S. (2022). Analisis Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7. 157-173. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v7i2.6805>
- Rovi, R., Agus, H., & Fitri, K. (2019). Implementasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada Anak Jalanan di Kota Tanjungpinang. *Universitas Maritim Raja Ali Haji*. <http://repositori.umrah.ac.id/299/>
- Rumbekwan, S. S. E. (2023). *Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial: Kontribusi Dana Otonomi Khusus terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan di Papua*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. [https://eprints.ipdn.ac.id/19986/2/Pengajuan%20Repository\\_SELLY%20SELVIAN\\_A%20EVA%20RUMBEKWAN.pdf](https://eprints.ipdn.ac.id/19986/2/Pengajuan%20Repository_SELLY%20SELVIAN_A%20EVA%20RUMBEKWAN.pdf)
- Saputra, R. (2019). Implementasi Pandu Gempita dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Konstituen*, 1(1), 23–44. <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/23-42>
- Sultanova, A., Karimova, Z., & Nurmatova, A. (2023). Community Capacity Building as a Strategy for Poverty Alleviation. *Community Development Journal*, 58(2), 215–230. <https://doi.org/10.1080/19452829.2023.2185726>

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.  
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

